



Tidak Kunjung Dilantik Pengurus PMI Kota Resah

YOGYA (KR) - Tiga bulan tidak kunjung dilantik, Pengurus PMI Kota Yogyakarta terpilih hasil Musyawarah Kota (Muskot) 30 Maret 2021, resah. Pasalnya tanpa SK dan pelantikan untuk legalitas sebagai pengurus mereka tidak bisa memutuskan kebijakan strategis, dan terbatas ruang geraknya. Apalagi di masa pandemi ini, PMI dituntut untuk bisa melayani masyarakat dengan baik cepat namun tidak bisa maksimal.

"Di tengah komponen PMI Kota (pegawai markas, unit donor darah, pegawai klinik dan relawan baik di PMI kota maupun di PMI kecamatan) gotong royong membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid 19. Penahanan SK oleh Ketua PMI DIY, jelas kontra produktif," ucap Kuasa Hukum Pengurus PMI Kota Terpilih Suswoto kepada wartawan, Rabu (14/7) di Markas PMI Kota Yogya, Tegalgedu Kotagede.

Didampingi beberapa pengurus terpilih, relawan dan pengurus kecamatan disebutkan Muskot berjalan lancar, menerima LPJ

Pengurus PMI 2016 - 2021 dan menetapkan Wakil Walikota Drs Heore Poerwadi MA sebagai ketua terpilih. Muskot juga dibuka dan dihadiri Sekretaris PMI DIY Arif Noor Hartanto SIP sebagai utusan yang mendapat mandat mewakili PMI DIY.

"Selanjutnya sesuai AD/ART ketua terpilih sekaligus sebagai ketua formatur, bersama anggota formatur melakukan rapat untuk menentukan susunan pengurus PMI Kota Yogyakarta 2021 - 2026 dan telah disosialisasikan ulang kepada peserta Muskot sebelum diajukan ke PMI DIY untuk dimintakan SK Pengesahannya," jelas Suswoto.

Ketua terpilih, pada 5 April 2021 mengajukan surat pada Ketua PMI DIY untuk menerbitkan SK Pengesahan Kepengurusan. "Semua syarat sudah dipenuhi termasuk permintaan audit eksternal dan setelah menunggu 2 bulan lebih, ketua terpilih melayangkan surat klarifikasi mengenai perkembangan SK Pengesahan dengan melihat SK Pengesahan pengurus PMI Kabupaten Kulon-

progo telah terbit dan dalam proses persiapan pelantikan padahal pengajuan SK-nya tidak jauh berbeda dengan PMI Kota Yogyakarta," ujarnya.

Tidak ada jawaban dari PMI DIY, ketua terpilih dan PMI kecamatan di Kota Yogyakarta kemudian mengajukan surat kepada HM Yusuf Kalla selaku Ketua Umum PMI untuk mengadakan sikap PMI DIY yang tidak adil kepada PMI Kota Yogyakarta. "Peserta Muskot merasa ada ketidakadilan dan intervensi pada susunan Pengurus PMI Kota Yogyakarta 2021 - 2026," keluhnya.

Sementara Ketua PMI DIY GBPH Prabokusumo menyatakan no coment, namun pada waktunya nanti ia telah mendelegasikan pada Arif Noor Hartanto untuk mengurai permasalahan yang ada. "Yang jelas semua yang saya lakukan selalu rembugan dengan pengurus tanpa pernah berpikiran buruk kepada siapapun dan saya selalu berpikir panjang sebab akibat dalam membuat kebijakan, sehingga kadang orang bisa salah tafsir," ujarnya. (Vin)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PMI Cab. Kota Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005